



## Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perpustakaan Daerah dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat (Studi Kasus Kabupaten Serang)

Dita Amalia<sup>1</sup>, Laeli Nur Khanifah<sup>2\*</sup>, Angeli Ramadhani<sup>3</sup>, Siti Alya Aryanti<sup>4</sup>, Azalia Salsabila<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [khanifah92@untirta.ac.id](mailto:khanifah92@untirta.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract.** Regional library development is an important part of local government efforts to improve public access to information and literacy services. This study aims to evaluate the planning of the Regional Library development in Serang Regency in supporting community literacy improvement. The research employed a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in depth interviews with the Regional Development Planning, Research, and Innovation Agency (BAPPERIDA) of Serang Regency and supported by literature studies from relevant documents and publications. The analysis was conducted using William N. Dunn's policy evaluation framework, which consists of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The findings indicate that the library development planning has been integrated into regional development planning documents and supported by funding from the central government through the Special Allocation Fund. The selection of the library location considered land availability, accessibility, and proximity to educational institutions. The study also found challenges related to supporting facilities and the limited number of librarians. Although the physical construction has been completed, the library had not yet been fully operational at the time of the research, making its impact on community literacy impossible to assess directly. The study implies that operational readiness, human resources, and sustainable literacy programs are essential to maximize the benefits of the regional library for the community.

**Keywords:** Adequacy; Literacy; Policy Evaluation; Regional Library; Regional Planning.

**Abstrak.** Pembangunan perpustakaan daerah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan literasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perencanaan pembangunan Perpustakaan Daerah Kabupaten Serang dalam mendukung peningkatan literasi masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Serang serta didukung oleh studi literatur dari berbagai dokumen dan sumber yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan perpustakaan telah terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus. Pemilihan lokasi pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan, aksesibilitas, dan kedekatan dengan kawasan pendidikan. Penelitian juga menemukan adanya tantangan berupa kebutuhan fasilitas pendukung dan keterbatasan tenaga pustakawan. Meskipun pembangunan fisik telah selesai, perpustakaan belum beroperasi secara penuh sehingga dampaknya terhadap peningkatan literasi masyarakat belum dapat diukur secara langsung. Penelitian ini menunjukkan pentingnya kesiapan operasional, sumber daya manusia, dan program literasi berkelanjutan untuk mengoptimalkan manfaat perpustakaan daerah bagi masyarakat.

**Kata kunci:** Evaluasi Kebijakan; Kecukupan; Literasi; Perencanaan Daerah; Perpustakaan Daerah.

### 1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan fasilitas publik, termasuk perpustakaan daerah, merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sejumlah penelitian telah mengkaji hubungan antara ketersediaan perpustakaan dan tingkat literasi masyarakat. Fadhli (2021) menegaskan bahwa perpustakaan daerah berperan sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat yang mendukung pemberdayaan

masyarakat. Pada konteks perencanaan pembangunan, Nugroho dan Pratiwi (2021) menemukan bahwa kualitas dokumen perencanaan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas layanan publik yang dihasilkan. Di sisi lain, berpijak pada data UNESCO, kajian literasi di Indonesia, menempatkan minat baca masyarakat pada peringkat rendah secara global, sehingga menunjukkan urgensi penyediaan infrastruktur perpustakaan yang memadai dan terencana dengan baik (Puspitasari, 2019).

Meskipun, kajian tentang perpustakaan dan literasi telah cukup banyak dilakukan, penelitian yang secara spesifik mengevaluasi proses perencanaan pembangunan perpustakaan daerah dari perspektif kebijakan publik masih sangat terbatas, khususnya di tingkat kabupaten/kota. Sebagian besar studi yang ada berfokus pada aspek pengelolaan koleksi atau kepuasan pengguna, bukan pada kualitas dokumen perencanaan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan literasi masyarakat lokal. Kabupaten Serang, sebagai salah satu daerah dengan indeks literasi yang masih perlu ditingkatkan di Provinsi Banten, belum pernah menjadi objek kajian evaluatif terkait perencanaan perpustakaan. Kondisi ini menciptakan kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*) yang penting untuk diisi, mengingat kualitas perencanaan merupakan penentu utama keberhasilan program peningkatan literasi berbasis infrastruktur. Penelitian ini, bertujuan untuk mengevaluasi perencanaan pembangunan perpustakaan daerah dalam meningkatkan literasi masyarakat di Kabupaten Serang menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Evaluasi Kebijakan (William N. Dunn, 2003)**

Menurut William N. Dunn (2003), evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam analisis kebijakan yang berfungsi untuk menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya mengenai kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi, dapat diketahui sejauh mana kebijakan yang telah dilaksanakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, mewujudkan nilai-nilai yang diharapkan, serta menciptakan peluang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, Dunn menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan pada dasarnya adalah proses penilaian terhadap hasil atau kinerja yang dihasilkan dari suatu kebijakan setelah kebijakan tersebut dirumuskan dan diimplementasikan. Dengan demikian, evaluasi berperan sebagai alat untuk mengukur tingkat keberhasilan kebijakan sekaligus menjadi dasar bagi perbaikan dan pengambilan keputusan di masa mendatang.

Menurut William N. Dunn, evaluasi kebijakan tidak hanya bertujuan untuk menilai apakah suatu program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, tetapi juga untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, merealisasikan nilai-nilai yang menjadi dasar kebijakan, serta memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan publik. Melalui evaluasi, pemerintah dapat memperoleh informasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai tingkat keberhasilan, efektivitas, maupun berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan pertimbangan penting dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan di masa mendatang, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Dunn (2003) menjelaskan bahwa kriteria yang digunakan dalam evaluasi kebijakan pada dasarnya sejalan dengan kriteria yang digunakan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan, yang meliputi beberapa aspek penting sebagai dasar untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan, yakni:

#### ***Efektivitas (effectiveness)***

Efektivitas digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan atau alternatif kebijakan mampu mencapai tujuan dan hasil yang telah ditetapkan. Kriteria ini berfokus pada tingkat keberhasilan kebijakan dalam menghasilkan dampak yang diharapkan, baik berupa keluaran (*output*), manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, maupun nilai atau keuntungan yang dihasilkan.

#### ***Efisiensi (efficiency)***

Efisiensi digunakan untuk menilai besarnya sumber daya, usaha, atau biaya yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan hasil yang telah ditetapkan. Kriteria ini menekankan pada perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan sumber daya yang digunakan selama proses pelaksanaan kebijakan. Semakin optimal hasil yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang minimal, maka semakin tinggi tingkat efisiensi kebijakan tersebut.

#### ***Kecukupan (adequacy)***

Kecukupan digunakan untuk menilai sejauh mana hasil yang dicapai melalui suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, mewujudkan nilai-nilai yang diharapkan, serta mengatasi permasalahan yang menjadi dasar lahirnya kebijakan tersebut. Kriteria ini berfokus pada hubungan antara pelaksanaan kebijakan dengan tingkat pencapaian hasil yang diinginkan.

#### ***Perataan (equity)***

Perataan (*equity*) digunakan untuk menilai sejauh mana manfaat, dampak, maupun beban yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan didistribusikan secara adil kepada seluruh kelompok masyarakat. Kriteria ini menekankan aspek keadilan dalam pembagian hasil kebijakan, baik berupa pelayanan publik, manfaat ekonomi, maupun biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat.

#### ***Responsivitas (responsiveness)***

Responsivitas digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu menanggapi dan memenuhi kebutuhan, aspirasi, preferensi, serta nilai-nilai yang dimiliki oleh kelompok sasaran atau masyarakat yang terdampak oleh kebijakan tersebut. Kriteria ini menekankan pentingnya kesesuaian antara kebijakan yang dilaksanakan dengan kebutuhan nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

#### ***Ketepatan (appropriateness)***

Ketepatan (*appropriateness*) merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai kesesuaian suatu kebijakan dengan tujuan yang ingin dicapai serta nilai-nilai yang melandasi tujuan tersebut. Kriteria ini berkaitan dengan rasionalitas substantif, yaitu menilai apakah tujuan program yang ditetapkan memang relevan dan memiliki nilai yang penting bagi masyarakat. Selain itu, ketepatan juga memperhatikan asumsi-asumsi yang menjadi dasar dalam perumusan kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan permasalahan yang dihadapi (Soulisa, 2017).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus menurut Creswell. Dapat didefinisikan penelitian sebagai suatu aktivitas yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data dengan maksud untuk mencari fakta atau kebenaran dari permasalahan yang sedang dikaji. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus Creswell.

Pendekatan studi kasus mempunyai ciri utama yaitu terdapat batasan waktu dan tempat. Penelitian yang penulis ambil batasan sesuai dengan yang penulis kaji terkait Analisis Perencanaan Pembangunan Pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Serang. Sedangkan batasan waktu penulis mengambil analisis perencanaan pembangunan pada perpustakaan Kabupaten Serang dari awal perencanaan sampai pemabngunan selesai dan efektifitasnya.

Fokus penelitian adalah pembatas yang tegas terkait dengan permasalahan yang dibawa dalam sebuah penelitian. Karena pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan studi kasus maka fokus penelitian yaitu pendalaman kasus terhadap suatu fenomena baik itu pada

diri individu, kelompok budaya maupun kehidupan (Creswell, 2015). Maka dari itu peneliti memfokuskan pada kasus yang dibawa yaitu terkait dengan Analisis Perencanaan Pembangunan Pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Serang.

Penelitian kualitatif (Creswell, 2015) terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data yang dapat dipakai di antaranya: pertama wawancara, salah satu teknik yang akan mendapatkan data lisan. Wawancara sangat dibutuhkan karena peneliti membutuhkan jawaban dan melihat secara langsung masalah yang sedang terjadi. Kedua Studi literatur, digunakan dengan cara mencari data data yang relevan seperti dari jurnal, berita, artikel dan buku yang nantinya akan menjadi acuan dan memperkuat dalam penulisan hasil penelitian.

Ketiga Dokumentasi, dapat didefinisikan juga sebagai metode pengumpulan data dengan memakai bahan tertulis yang dibuat oleh suatu kelompok yang menjadi sasaran penelitian seperti gambar, hasil laporan atau rekaman. Pada penelitian ini, terdapat dua cara yang digunakan peneliti yaitu dengan data primer dan sekunder.

Mengutip dalam buku Creswell 2013, terdapat teknik analisis data yang dapat dilakukan peneliti, diantaranya pertama Membentuk dan menyiapkan bahan yang akan. Kedua setelah data sudah didapat selanjutnya melakukan pemeriksaan keseluruhan agar mendapatkan gambaran yang jelas. Ketiga setelah data sudah tergambar maka tahap selanjutnya adalah mengelompokkan sesuai data yang sudah didapatkan sebelumnya. Keempat selanjutnya mendeskripsikan tema dengan data yang sudah didapatkan sebelumnya. Terakhir yaitu menerangkan secara keseluruhan data yang sudah di analisis dalam bentuk narasi deskriptif.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Serang pada bulan Mei 2026. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan Perpustakaan Daerah Kabupaten Serang serta didukung oleh studi literatur dari dokumen perencanaan daerah, berita resmi pemerintah daerah, dan berbagai sumber pustaka yang relevan.

Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan Perpustakaan Daerah Kabupaten Serang merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan literasi dan sumber informasi. Perencanaan pembangunan dilakukan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta rencana kerja tahunan perangkat

daerah. Dalam proses tersebut, BAPPERIDA berperan sebagai koordinator perencanaan pembangunan, sedangkan pelaksanaan teknis pembangunan dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang.

Pembangunan perpustakaan memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembangunan perpustakaan diawali dengan usulan pemerintah daerah yang kemudian memperoleh persetujuan pemerintah pusat setelah melalui proses kajian dan verifikasi kebutuhan. Temuan ini menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas publik yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selain aspek pendanaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan lokasi pembangunan perpustakaan didasarkan pada pertimbangan strategis. Lokasi pembangunan berada pada lahan milik pemerintah daerah sehingga memudahkan proses pembangunan tanpa memerlukan pengadaan lahan baru. Selain itu, lokasi tersebut berada pada kawasan pendidikan dan berdekatan dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga dinilai memiliki potensi pemanfaatan yang tinggi oleh masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembangunan fisik perpustakaan telah selesai dilaksanakan, namun belum dioperasikan secara penuh karena masih memerlukan penyempurnaan fasilitas pendukung serta persiapan sumber daya manusia. Salah satu tantangan yang ditemukan adalah keterbatasan jumlah tenaga pustakawan yang akan mendukung operasional perpustakaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan perpustakaan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya infrastruktur fisik, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan sistem pelayanan yang akan dijalankan.

Temuan lain menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya merancang perpustakaan sebagai tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tetapi juga sebagai ruang publik berbasis literasi digital. Konsep ini diwujudkan melalui rencana penyediaan fasilitas teknologi informasi, akses internet, ruang diskusi, serta berbagai fasilitas penunjang yang diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan perpustakaan.

## **Pembahasan**

### ***Efektivitas***

Efektivitas menurut William Dunn diartikan sebagai metode untuk menakar kuantitas dari suatu kebijakan. Pada konteks perencanaan pembangunan di Perpustakaan Kabupaten Serang, sasaran terpentingnya adalah memberikan fasilitas bacaan yang lengkap, memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan meningkatkan indeks literasi masyarakat di

Kabupaten Serang. Hasil wawancara dengan BAPPERIDA Kabupaten Serang, pembangunan perpustakaan Kabupaten Serang dilakukan melalui perencanaan yang tertuang dalam RPJMD dan Renja tahunan dan pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat langsung melalui Dana Alokasi Khusus. Pemilihan lokasi pembangunan perpustakaan Kabupaten Serang dipilih pada lokasi tersebut karena berada pada jalur pendidikan dan disebut berada pada titik tengah Kabupaten Serang yang dapat memudahkan masyarakat untuk menjangkaunya.

Jika dilihat dari sisi pembangunan, pembangunan perpustakaan dapat dikatakan telah rampung 100% dengan luas bangunan 1.866 meter persegi, hanya saja masih perlu tambahan pada fasilitas dan kelengkapan buku untuk dapat dioperasikan sepenuhnya. Mengutip pada artikel (Wahyudi, 2026) , Bupati Kabupaten Serang juga memperkuat fakta bahwa pembangunan secara fisik sudah selesai 100% dan hanya perlu menunggu peresmian dari pemerintah pusat mengingat anggaran yang ada berasal dari DAK. Keadaan ini menunjukkan bahwa sasaran pembangunan infrastruktur yang sebelumnya direncanakan telah berhasil diwujudkan.

Tercapainya pembangunan secara fisik pada perpustakaan Kabupaten Serang menggambarkan kepedulian pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat pada aspek literasi yang modern. Perpustakaan Kabupaten Serang juga tidak hanya dirancang sebagai tempat kumpulan buku namun sebagai akan dilengkapi dengan fasilitas digital, ruang komunitas dan sarana pendukung lainnya. Rancangan tersebut selaras dengan sasaran pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan publik pada aspek pendidikan dan literasi. Jadi intinya jika kita melihat efektivitas atau output pembangunan berupa gedung fisik Perpustakaan Kabupaten Serang telah terwujud namun belum dapat diukur pemanfaatan langsung bagi masyarakat.

### ***Efisiensi***

Efisiensi menurut William Dunn di artikan sebagai tolak ukur untuk menilai apakah suatu kebijakan sudah berjaya sesuai dengan tujuan ataupun apakah suatu kebijakan memberikan dampak positif pada banyak masyarakat. Kebijakan dapat dikatakan efisien jika memberikan hasil akhir yang optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat. Seperti yang terjadi pada pembangunan perpustakaan Kabupaten Serang menelan anggaran sebesar Rp 8,6 miliar yang berasal dari Dana Alokasi Khusus APBN. Anggaran yang berasal dari pemerintah pusat ini memberikan nilai lebih untuk pemerintah daerah Kabupaten Serang karena tidak terbebani pada pembiayaan keseluruhan pembangunan perpustakaan yang tidak perlu menggunakan APBD. Peran pemerintah daerah mendukung pendampingan seperti fasilitas penunjang dan kebutuhan operasional lainnya.

Efisiensi perencanaan pembangunan juga dapat dilihat dari keberhasilan pembangunan fisik gedung perpustakaan yang sekarang sudah mencapai 100% dengan luas 1.866 meter persegi. Selain itu menurut pemaparan kepala DPKD Kabupaten Serang angka anggaran Rp. 8,6 miliar termasuk ke dalam biaya yang minim jika dibandingkan dengan luas bangunan gedung perpustakaan Kabupaten Serang yang setara dengan 30 unit rumah tipe 60 yang di mana seharusnya anggaran pembangunan perpustakaan Kabupaten Serang dapat mencapai Rp. 12 miliar (Aryadi, 2026).

Selain itu koordinasi dan kerja sama antara stakeholder seperti BAPPERIDA yang melakukan perencanaan dan evaluasi perencanaan di akhir dan DPKD sebagai pelaksanaan teknis berjalan dengan baik dalam proses perencanaan pembangunan dan sinkronisasi program. Hal tersebut menunjukkan pengelolaan sumber daya organisasi dinilai efisien karena mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan. Namun memang dalam efisiensi pemanfaatan belum dapat dinilai karena masih diperlukan kelengkapan fasilitas dan peresmian dari pemerintah pusat baru setelahnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

### ***Kecukupan***

Pada indikator ini, kecukupan digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengatasi permasalahan yang menjadi dasar lahirnya kebijakan tersebut. Kriteria ini juga memiliki keterkaitan yang erat dengan efektivitas karena menekankan pada apakah hasil yang dicapai sudah memadai dalam menjawab kebutuhan yang ada (Setiawan et al., 2017).

Berdasarkan informasi dari pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kabupaten Serang, diketahui bahwa pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Serang telah selesai dilaksanakan dan saat ini memasuki tahap persiapan operasional. Informan menjelaskan bahwa peresmian gedung perpustakaan direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2026.

Menjelang peresmian tersebut, DPKD masih melakukan berbagai persiapan, antara lain penataan koleksi buku, penyediaan sarana dan prasarana pendukung layanan, pengaturan tata ruang perpustakaan, serta persiapan sumber daya manusia yang akan bertugas dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan. Kehadiran gedung perpustakaan baru ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap sumber informasi, menyediakan fasilitas belajar yang lebih nyaman dan representatif, serta menjadi wadah bagi berbagai kegiatan literasi dan edukasi masyarakat di Kabupaten Serang.

Ditinjau berdasarkan indikator kecukupan yang dikemukakan oleh William N. Dunn, pembangunan Perpustakaan Daerah Kabupaten Serang menunjukkan adanya komitmen

pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas literasi yang lebih layak dan memadai. Penyediaan gedung perpustakaan yang baru merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan. Keberadaan fasilitas tersebut juga diharapkan mampu mendukung peningkatan minat baca serta kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Serang.

Kebutuhan masyarakat terhadap sarana perpustakaan memang telah mulai diakomodasi melalui pembangunan infrastruktur fisik, namun sejauh mana fasilitas tersebut mampu menjawab permasalahan literasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara nyata masih belum dapat diketahui. Dampak dan manfaat kebijakan baru dapat diukur setelah perpustakaan mulai beroperasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

### ***Pemerataan***

Pemerataan merupakan kriteria yang menekankan pentingnya distribusi manfaat dan hasil kebijakan secara adil sehingga dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat (Setiawan et al., 2017). Pada pembangunan Perpustakaan Daerah Kabupaten Serang, hal ini dapat menjadi upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui penyediaan fasilitas perpustakaan yang ditujukan untuk kepentingan publik secara luas.

Kehadiran perpustakaan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang setara bagi masyarakat dalam mengakses informasi, pengetahuan, dan layanan literasi. Selain itu, lokasi perpustakaan yang berdekatan dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) serta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (UIN SMH) Banten turut mendukung kemudahan akses bagi kalangan mahasiswa, akademisi, maupun masyarakat umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan perpustakaan telah dirancang agar manfaatnya dapat menjangkau kelompok pengguna yang beragam dan dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat Kabupaten Serang.

Selain menghadirkan buku-buku yang beragam, Perpustakaan Daerah Kabupaten Serang juga dirancang dengan berbagai fasilitas pendukung yang dapat menunjang kebutuhan penggunaannya. Fasilitas tersebut meliputi ruang baca yang nyaman, area diskusi, serta layanan berbasis teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Informan menjelaskan bahwa penyediaan berbagai fasilitas tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber informasi sekaligus mendorong penguatan budaya literasi di Kabupaten Serang. Meskipun pembangunan gedung telah selesai dilaksanakan, saat ini perpustakaan masih berada pada tahap persiapan operasional, termasuk penataan fasilitas dan layanan, sebelum resmi diresmikan dan dibuka untuk umum pada 30 Juni 2026.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari BAPPERIDA Kabupaten Serang, pembangunan Perpustakaan Daerah dipandang sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan akses terhadap pendidikan, informasi, dan pengetahuan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan perpustakaan diarahkan agar dapat menjadi fasilitas publik yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memberikan akses belajar yang lebih inklusif bagi masyarakat Kabupaten Serang.

Untuk penilaian pada aspek pemerataan masih belum dapat dilakukan secara menyeluruh karena perpustakaan tersebut belum resmi beroperasi dan belum dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Walaupun tujuan dan manfaat pembangunan telah dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Serang, tingkat pemerataan manfaat yang sesungguhnya baru dapat diketahui setelah perpustakaan mulai memberikan layanan.

### ***Responsivitas***

Responsivitas mengacu pada sejauh mana program berhasil memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai dari kelompok yang menjadi sasaran utama (Dunn, 2003). Indikator ini, tidak hanya sekedar mengukur apakah *output* kebijakan telah diproduksi?, akan tetapi lebih kepada apakah *output* tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang dituju?. Pada konteks pembangunan perpustakaan daerah di Kabupaten Serang ini, responsivitas berarti mengarah pada kemampuan program untuk menjawab kondisi nyata literasi masyarakat, termasuk keterbatasan akses fisik rendahnya minat baca dan kesenjangan layanan antar wilayah perkotaan dan pedesaan. Kepala DPKD Kabupaten Serang mengungkapkan bahwa tingkat kegemaran membaca masyarakat Kabupaten Serang pada tahun 2023 berada di bawah 60%. Walaupun, di tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 68,79%, tetapi literasi di Kabupaten Serang masuk dalam kelompok sedang, jadi belum pada tingkatan baik, dan belum tinggi (Serangkab.go.id, 2025). Secara tidak langsung, hal ini memperjelas bahwa keputusan pembangunan perpustakaan daerah di Kabupaten Serang, bukan hanya sekedar agenda pembangunan infrastruktur saja, akan tetapi respons terhadap kesenjangan layanan yang nyata dan diakui secara kelembagaan, sehingga pembangunan gedung belum responsif terhadap kebutuhan literasi masyarakat.

Kabupaten Serang memiliki lebih dari 300 Desa, sementara DPKD Kabupaten Serang hanya memiliki 5 unit mobil perpustakaan keliling yang mana hal ini memperlihatkan adanya ketimpangan yang secara matematis mustahil untuk menghasilkan layanan yang merata. Keterbatasan jangkauan ini, secara tidak langsung memperlihatkan bentuk defisit responsivitas struktural yang mana kebijakan secara teknis ada dalam bentuk layanan perpustakaan keliling, namun kapasitasnya secara fundamental tidak memadai untuk merespons skala kebutuhan yang

sesungguhnya di masyarakat. Pembangunan gedung perpustakaan di Kabupaten Serang ini, dipandang sebagai upaya konkret pemerintah daerah untuk merespons defisit layanan tersebut.

Kepala DPKD Kabupaten Serang juga menegaskan bahwa perpustakaan ini bukan hanya sekedar fasilitas fisik, akan tetapi pusat literasi inklusif yang meliputi sejumlah dimensi, baik dari pendidikan, kesehatan, sosial, seni budaya, hingga media kreatif dan inovatif. Fasilitas yang direncanakan meliputi koleksi buku, *e-library*, wifi dan ruang-ruang kreatif yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai komunitas (Fakta banten.co.id,2025). Penuturan pihak BAPERRIDA terkait konsep *hospitality* yang diusung dengan arti “gedung perpustakaan ini harus menjadi rumah bersama” memperlihatkan bahwa kesadaran, akan responsivitas perencanaan perpustakaan tidak hanya soal menyediakan buku, akan tetapi menciptakan ruang yang benar-benar bisa diakses dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat (Banten news.co.id,2025; Hasil Wawancara, 2026).

Selain itu, lokasi geografis yang dipandang strategis yang mana berada diantara dua perguruan tinggi besar, yaitu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan UIN Sultan Maulana Hasanuddin dan menunjukkan adanya pertimbangan responsivitas berbasis segmentasi yang menempatkan fasilitas di lokasi strategis yang dapat melayani mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum secara bersamaan. Meskipun, pembangunan gedung perpustakaan ini menjadi langkah yang secara konseptual responsif, akan tetapi per Januari 2025 gedung dinyatakan selesai pada tahap awal, namun masih dalam proses penyempurnaan sarana penunjang dan penyusunan strategi operasional dan baru akan dibuka tanggal 30 juni 2026. Responsivitas pada kerangka dan bukan hanya berbicara soal niat kebijakan, akan tetapi soal dampak yang benar-benar dirasakan. Selama gedung perpustakaan ini belum beroperasi dan menjangkau masyarakat secara aktif terkhusus kelompok yang paling rentan terhadap kesenjangan literasi, seperti masyarakat pedesaan, anak usia sekolah di daerah terpencil, dan kelompok marginal, maka responsif kebijakan ini baru berada pada tahap potensi yang belum teraktualisasi. Dengan demikian, secara keseluruhan responsivitas dalam kebijakan pembangunan perpustakaan daerah Kabupaten Serang dapat dinilai sebagai responsif secara konseptual desain, namun masih dalam proses pembuktian responsivitas substantif terhadap kebutuhan nyata masyarakat.

### ***Ketepatan***

Ketepatan berkaitan dengan apakah tujuan kebijakan itu sendiri sudah benar dan tepat untuk diterapkan pada permasalahan yang hendak diselesaikan?. Indikator ini, menilai kesesuaian antara nilai-nilai yang mendasari kebijakan, asumsi tentang kebutuhan masyarakat, pilihan instrumen kebijakan, dan konteks sosial budaya yang mana kebijakan tersebut

diimplementasikan. Indikator ketepatan dapat dilihat dari pergeseran paradigma literasi yang diadopsi. Pendekatan literasi inklusif yang diadopsi oleh DPKD Kabupaten Serang selaras dengan amanah undang-undang terkait perpustakaan yang menekankan fungsi perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, sehingga pilihan paradigma literasi inklusif ini dinilai tepat karena memperlihatkan pemahaman yang akurat tentang kompleksitas kebutuhan masyarakat Kabupaten Serang yang bukan hanya membutuhkan akses buku, akan tetapi ruang belajar, ruang kreasi, dan ruang komunitas yang holistik.

Selain itu, indikator ketepatan juga dilihat dari pemilihan lokasi dan desain fisik gedung. Pertama, dari sisi efisiensi geografis, lokasi ini diapit oleh dua kampus yang dapat memaksimalkan potensi penggunaan fasilitas oleh populasi yang paling membutuhkan, yaitu mahasiswa, peneliti, dan pelajar. Kedua, dari sisi sinergi kelembagaan, yaitu kedekatan dengan perguruan tinggi membuka peluang kolaborasi antara kampus dan Perpustakaan RI. Ketepatan ini, secara implisit juga mengandung *trade off* yang mana masyarakat di wilayah pelosok Kabupaten Serang yang justru paling membutuhkan layanan literasi berpotensi tidak terlayani oleh satu gedung perpustakaan terpusat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang tahun 2023 mengungkapkan bahwa kondisi perpustakaan di SD maupun SMP Kabupaten Serang masih belum memenuhi standar (Kantorbahasabanten.kemendikdasmen.go.id, 2023). Hal ini, memperlihatkan bahwa fokus kebijakan pada pembangunan satu gedung perpustakaan daerah yang besar dan representatif, sementara ratusan perpustakaan sekolah di tingkat dasar dan menengah pertama masih di bawah standar memperlihatkan ketidaktepatan prioritas alokasi sumber daya. Selaras dengan perspektif ketepatan Dunn (2003) yang menanyakan apakah membangun suatu perpustakaan besar yang inklusif itu lebih tepat dibandingkan perpustakaan di ratusan sekolah yang ada? Perpustakaan daerah yang terpusat lebih tepat dibangun dalam ekosistem literasi jangka panjang dan pelayanan komunitas dewasa, sementara penguatan perpustakaan sekolah lebih tepat untuk intervensi dini di kalangan pelajar. Kedua jalur ini ditempuh secara bersamaan, walaupun dengan kapasitas yang tidak seimbang, sehingga mencerminkan ketepatan yang parsial, yaitu tepat dalam visi, akan tetapi membutuhkan penguatan dalam distribusi prioritas dan sumber daya. Demikian, evaluasi terhadap indikator ketepatan dalam kebijakan pembangunan perpustakaan daerah di Kabupaten Serang telah tepat dalam hal paradigma literasi inklusif, lokasi strategis, dan kolaboratif, serta pendekatan program berbasis komunitas dan generasi muda, akan tetapi terjadi ketidaktepatan dalam hal distribusi prioritas yang mana kebijakan cenderung berorientasi pada pembangunan fasilitas besar di pusat, dibandingkan pemerataan kualitas di tingkat akar rumput.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan pembangunan Perpustakaan Daerah Kabupaten Serang telah dilaksanakan secara terstruktur melalui dokumen perencanaan daerah dan didukung oleh pendanaan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemilihan lokasi pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek strategis, seperti ketersediaan lahan pemerintah, aksesibilitas wilayah, serta kedekatannya dengan kawasan pendidikan. Berdasarkan evaluasi menggunakan teori William N. Dunn, perencanaan pembangunan perpustakaan menunjukkan capaian yang cukup baik pada aspek efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan ketepatan. Namun, aspek kecukupan dan pemerataan belum dapat dinilai secara optimal karena perpustakaan belum beroperasi sehingga manfaatnya terhadap peningkatan literasi masyarakat belum dapat diukur secara langsung.

Pemerintah Kabupaten Serang perlu memastikan kesiapan fasilitas pendukung, layanan digital, serta ketersediaan tenaga pustakawan sebelum perpustakaan dioperasikan secara penuh. Selain itu, diperlukan strategi sosialisasi dan pengembangan program literasi yang berkelanjutan agar perpustakaan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena dilakukan saat perpustakaan belum beroperasi dan hanya melibatkan informan dari BAPPERIDA Kabupaten Serang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat dilakukan setelah perpustakaan beroperasi dengan melibatkan lebih banyak informan untuk menilai dampaknya terhadap peningkatan literasi masyarakat.

## DAFTAR REFERENSI

- Angela, V. F. (2024). Implementasi kebijakan perpustakaan daerah dalam upaya peningkatan minat baca masyarakat. *Jurnal Sains Student Research*, 2(1), 673–677.
- Aryadi, F. (2026). *Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Serang Rampung Tahap Awal, Siap Jadi Pusat Literasi Inklusif*. Fakta Banten.  
<https://faktabanten.co.id/serang/gedung-perpustakaan-dan-arsip-daerah-kabupaten-serang-rampung-tahap-awal-siap-jadi-pusat-literasi-inklusif/>
- Azizah, L. L. (2023). Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Melalui Teori William Dunn (Studi Kasus pada SDN Lidah Kulon I/464 Surabaya). *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 14(2), 48-57.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2026, February 25). Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Dimensi Penyusunnya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2025. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Dimensi Penyusunnya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2025 - Statistical Data - BPS-Statistics Indonesia Banten Province
- Creswell, J. W. (2013). *QUALITATIVE INQUIRY RESEARCH DESIGN: Choosing Among*

- Creswell, J. W. (2013). *QUALITATIVE INQUIRY RESEARCH DESIGN: Choosing Among*
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang. (2022). *Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026*. [https://dpkd.serangkab.go.id/storage/media/resntra-dpkd-2021-2026\\_1687147665.pdf](https://dpkd.serangkab.go.id/storage/media/resntra-dpkd-2021-2026_1687147665.pdf)
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. (2026, February 20). *Hambatan dan Solusi Membangun Budaya Membaca di Masyarakat*. <https://dpk.bantenprov.go.id/berita/hambatan-dan-solusi-membangun-budaya-membaca-di-masyarakat>
- Fadhli, R. (2021). Implementasi kompetensi pembelajaran sepanjang hayat melalui program literasi di perpustakaan sekolah. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 9(1), 19–38.
- Five Approaches. In L. Habib (Ed.), SAGE Publications Ltd. (THIRD EDIT, Vol. 11, Issue 1)
- Five Approaches. In L. Habib (Ed.), SAGE Publications Ltd. (THIRD EDIT, Vol. 11, Issue 1). Vicki Knight Associate. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Gao, W., Pun, R., & Ruan, L. (2021). Strategic planning for the Chinese American Library Association: From process to implementation. *International Journal of Librarianship*, 6(2), 1–14.
- John, W. C. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. *Mycological Research*, 94(3), 522.
- John, W. C. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. *Mycological Research*, 94(3), 522.
- Manghayu, A. (2018). Perencanaan pembangunan partisipatif dalam penerapan e-musrenbang. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 95-115.
- Manghayu, A. (2018). Perencanaan pembangunan partisipatif dalam penerapan e-musrenbang. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 95-115.
- Muhammad, U. A. (2026, January 2). *Telan Rp8,6 miliar, pembangunan Perpustakaan Kabupaten Serang dipastikan tanpa denda*. *Tribun Banten*. <https://banten.tribunnews.com/kab-serang/147818/telan-rp86-miliar-pembangunan-perpustakaan-kabupaten-serang-dipastikan-tanpa-denda>
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2024). *Indeks pembangunan literasi masyarakat 2024*. Perpustakaan Nasional RI.
- Puspitasari, D. (2019). Implementasi crowdsourcing dalam dunia perpustakaan. *JPUA: Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga*, 9(1), 35–39.
- Radar Banten. (2026, March 2). *Literasi Banten Peringkat Dua IPLM 2025, Momentum Emas Bagi Banten*. <https://www.radarbanten.co.id/2026/03/02/literasi-banten-peringkat-dua-iplm-2025-momentum-emas-bagi-banten/>
- Santoso, E. B., Moenek, R., & Nurpahdi, M. (2019). Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(1), 17-32.

- Septiana, Y., & Salahudin. (2021). Perencanaan pembangunan daerah melalui pendidikan: Sebuah kajian pustaka terstruktur (systematic literature review). *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(1), 45–60.
- Setiawan, N. P., Hernawan, D., & Salbiah, E. (2017). Evaluasi kebijakan peraturan daerah kota Bogor no 12 tahun 2009 tentang kawasan tanpa rokok (studi kasus pelaksanaan kawasan tanpa rokok pada sekolah menengah atas negeri di kota Bogor). *Jurnal Governansi*, 3(1), 13-22.
- Simanjuntak, D. T. (2020). Strategic planning design in the development of multifunction services of North Nias public library. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 6(3), 343–352.
- Sofyan, H. P., Permana, H., & Husein, C. S. (2025). Perencanaan budaya literasi melalui layanan perpustakaan keliling di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 10(1), 1–12.
- Sulistiyo, H., & Pratiwi, F. A. (2021). The effect of budget planning and budget evaluation on social services performance of Karawang District. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 10(1), 118–134.
- Suroso, A., & Rahayu, E. (2020). Perencanaan partisipatif pembangunan desa Pejengkolan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 123–132.
- Viva Banten. (2026, January 6). Anggaran Rp8,6 Miliar Dipersoalkan, Klarifikasi Kepala DPKD Kabupaten Serang.
- Wahyudi, M. F. M. (2026). *Pembangunan Perpustakaan Serang Senilai Rp 8,6 Miliar Rampung, Tunggu Izin Operasional*. Investor.Id. <https://investor.id/national/423667/pembangunan-perpusda-serang-senilai-rp-86-miliar-rampung-tunggu-izin-operasional>
- Wirawan, R., Mardiyono, M., & Nurpratiwi, R. (2015). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 4(2), 42434.
- Wirawan, R., Mardiyono, M., & Nurpratiwi, R. (2015). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 4(2), 42434.